



Pelaksanaan Kebijakan Program Kartu Indonesia Pintar dalam Mewujudkan Hak Pendidikan bagi Siswa yang tidak Mampu

Nizam¹, Yuliatin², Sawaludin³

^{1,2,3}Universitas Mataram, Indonesia

E-mail: nizam12@gmail.com, hjyuliatin@gmail.com, sawaludin@unram.ac.id

Article Info	Abstract
Article History Received: 2025-10-07 Revised: 2025-11-13 Published: 2025-12-06 Keywords: <i>Smart Indonesia Card; Program Policy; Right to Education; Students.</i>	This study aims to determine and analyze the implementation of the Smart Indonesia Card (KIP) Program policy in realizing the right to education for underprivileged students in Tolowata Village, Ambalawi District, Bima Regency. The KIP Program is part of the government's efforts to ensure equitable and inclusive access to education, especially for underprivileged communities. The research method used was a qualitative approach, with data collection techniques through observation, in-depth interviews, and documentation. The results indicate that the implementation of the KIP Program in Tolowata Village has made a positive contribution to improving access to education for students from underprivileged families. However, several obstacles remain, such as a lack of program socialization, delays in disbursement of funds, and inaccurate beneficiary data. This study concludes that although the KIP Program has been implemented and has had a tangible impact, evaluation and improvements are needed in the distribution and data verification mechanisms to optimally achieve the program's objectives.
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2025-10-07 Direvisi: 2025-11-13 Dipublikasi: 2025-12-06 Kata kunci: <i>Kartu Indonesia Pintar; Kebijakan Program; Hak Pendidikan; Siswa.</i>	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan kebijakan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam mewujudkan hak pendidikan bagi siswa yang tidak mampu di Desa Tolowata, Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima. Program KIP merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menjamin akses pendidikan yang merata dan inklusif, khususnya bagi masyarakat kurang mampu. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program KIP di Desa Tolowata telah memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan akses pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala seperti kurangnya sosialisasi program, keterlambatan pencairan dana, serta data penerima manfaat yang belum sepenuhnya akurat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun pelaksanaan Program KIP telah berjalan dan memberikan dampak nyata, perlu adanya evaluasi dan perbaikan dalam hal mekanisme penyaluran dan verifikasi data agar tujuan program dapat tercapai secara optimal.

I. PENDAHULUAN

Desa Tolowata, yang terletak di Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima, merupakan salah satu wilayah yang menjadi fokus pelaksanaan program Kartu Indonesia Pintar (KIP). Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 17 Maret 2025, ditemukan sejumlah fenomena yang mengindikasikan adanya ketidaktepatan dalam pelaksanaan program ini. Beberapa siswa dari keluarga mampu secara ekonomi justru terdaftar sebagai penerima KIP, sementara siswa dari keluarga yang tergolong tidak mampu tidak terdaftar sebagai penerima. Selain itu, terdapat pula keterlambatan dalam pencairan dana serta kurangnya pengawasan dalam penggunaan dana bantuan karena mekanisme penyaluran

dilakukan langsung melalui bank, sehingga pihak sekolah hanya berperan sebagai implementor dan sulit melakukan pemantauan penggunaan dana oleh siswa dan orang tua. Padahal, tujuan program ini adalah untuk membantu siswa miskin dalam memenuhi kebutuhan pendidikan seperti buku, seragam, alat tulis, transportasi, uang saku, kursus tambahan, dan keperluan sekolah lainnya.

Wilayah Desa Tolowata sendiri memiliki karakteristik sosial ekonomi yang unik, dengan mayoritas penduduknya berasal dari keluarga berpenghasilan rendah. Hal ini menjadikan Desa Tolowata sebagai lokasi yang sangat relevan untuk diteliti dalam konteks pelaksanaan program KIP dan dampaknya terhadap pemenuhan hak pendidikan siswa. Meskipun

tujuan program ini sangat mulia, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai tantangan, seperti minimnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai manfaat dan prosedur program KIP serta isu ketidakmerataan distribusi bantuan yang memunculkan ketidakpuasan di masyarakat. Sosialisasi program KIP kepada masyarakat merupakan langkah awal yang krusial dalam menjamin keberhasilan implementasi program ini. Tanpa pemahaman yang baik, banyak orang tua yang tidak menyadari bahwa mereka berhak mendapatkan bantuan pendidikan untuk anak-anak mereka (Muhammad Saroni, 2021:15). Selain itu, siswa di daerah terpencil sering kali kesulitan mengakses fasilitas pendidikan meskipun mereka telah menerima bantuan dari KIP. Infrastruktur yang buruk, seperti jalan rusak dan sulitnya transportasi, menjadi hambatan nyata bagi siswa untuk pergi ke sekolah. Aspek lain yang tidak kalah penting adalah perlunya pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program agar bantuan tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Hal ini menuntut keterlibatan aktif dari masyarakat, sekolah, dan lembaga terkait dalam proses monitoring dan evaluasi kebijakan.

Program Kartu Indonesia Pintar sendiri merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anak, khususnya yang berasal dari keluarga kurang mampu, dapat memperoleh akses pendidikan yang layak (Suhardi, 2021:77). Program ini memberikan bantuan dana pendidikan yang dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan sekolah seperti buku, seragam, dan alat tulis. Dengan adanya KIP, diharapkan hambatan finansial tidak lagi menjadi alasan bagi anak-anak miskin untuk tidak sekolah. Pendidikan merupakan salah satu hak asasi manusia yang fundamental dan menjadi pilar utama dalam pembangunan bangsa yang layak (Sipa Aulia Hasnah, 2020:56). Dalam konteks Indonesia, pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana peningkatan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Namun pada kenyataannya, masih banyak anak-anak di Indonesia yang kesulitan mengakses pendidikan yang layak, terutama mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu. Pembangunan pendidikan yang berkualitas merupakan strategi utama dalam melahirkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul, menguasai ilmu pengetahuan

dan teknologi, serta memiliki daya saing tinggi. Sejak tahun 2015, pemerintah telah menggulirkan kebijakan wajib belajar 12 tahun, mencakup pendidikan dasar 9 tahun dan akses ke pendidikan menengah. Namun, kebijakan yang memihak kepada kesejahteraan masyarakat ini belum sepenuhnya mampu mengurangi beban biaya pendidikan. Hal ini dikarenakan keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh isi kebijakan itu sendiri, tetapi juga oleh bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan di lapangan.

Kesempatan warga miskin untuk memperoleh pendidikan pun masih belum merata. Hadi Supeno (2020:79) menyatakan bahwa pendidikan yang awalnya merupakan jalan keluar dari kemelaratan, kini telah berubah menjadi alat dari sistem masyarakat kapitalis. Pendidikan hanya bisa dinikmati oleh mereka yang berasal dari kalangan menengah ke atas karena biaya yang mahal. Pendidikan seolah menjadi barang mewah yang tidak semua orang dapat jangkau. Pasal 34 UUD 1945 memang telah menjamin bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Namun, jika dilihat dari kenyataan, kalimat tersebut hanya menjadi cita-cita yang belum terwujud secara merata, terutama bagi masyarakat miskin. Muhammad Saroni (2013:8) juga menyatakan bahwa para pejabat politik, baik di tingkat pusat maupun daerah, lebih fokus pada kepentingan pribadi daripada menjalankan amanat untuk memperhatikan masyarakat miskin. Akibatnya, masyarakat miskin terpaksa berjuang sendiri dalam menghadapi sistem yang tidak berpihak kepada mereka. Masalah pembiayaan pendidikan pun menjadi salah satu kendala utama, khususnya bagi masyarakat dari lapisan menengah ke bawah yang hanya bisa menjadi penonton dalam arena pendidikan karena tidak mampu membeli "karcis" untuk duduk di kursi penonton yang nyaman.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan mendeskripsikan secara mendalam pelaksanaan kebijakan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam mewujudkan hak pendidikan bagi siswa yang tidak mampu di Desa Tolowata, Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggambarkan secara komprehensif proses dan makna pelaksanaan kebijakan dari perspektif para pelaku dan penerima manfaat.

Penelitian dilaksanakan di Desa Tolowata, Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima pada bulan Juni hingga Agustus 2024. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari Data primer, diperoleh langsung melalui wawancara dengan siswa penerima KIP, kepala desa, dan pihak sekolah. Data sekunder, diperoleh melalui dokumen resmi, literatur, arsip, serta data pendukung lainnya yang relevan dengan pelaksanaan program KIP.

Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan secara langsung terhadap pelaksanaan kebijakan, wawancara digunakan untuk memperoleh informasi dari informan kunci, sedangkan dokumentasi dimanfaatkan untuk melengkapi data melalui dokumen dan foto kegiatan. Subjek penelitian mencakup kepala desa dan siswa SD, SMP, serta SMA penerima manfaat KIP di Desa Tolowata. Pemilihan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, yakni memilih informan yang dianggap mengetahui secara mendalam tentang pelaksanaan program KIP.

Analisis data menggunakan model interaktif menurut Sugiyono (2020) yang meliputi tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Seluruh proses analisis dilakukan secara simultan selama pengumpulan data hingga diperoleh kesimpulan yang valid dan bermakna.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tolowata, Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Desa ini memiliki jumlah penduduk sekitar 2.339 jiwa yang sebagian besar bekerja di sektor informal seperti petani, pedagang kecil, dan buruh harian. Kondisi sosial ekonomi masyarakat tergolong menengah ke bawah, sehingga keberadaan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) sangat membantu meringankan beban biaya pendidikan anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan Program KIP di Desa Tolowata berjalan cukup baik, meskipun masih menghadapi beberapa hambatan. Berdasarkan data lapangan, terdapat 110 siswa penerima manfaat KIP yang tersebar pada jenjang SD, SMP, dan SMA. Bantuan KIP dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan pendidikan seperti pembelian seragam

sekolah, alat tulis, buku, transportasi ke sekolah, dan uang saku. Pemanfaatan dana tersebut sangat membantu siswa agar tetap bisa melanjutkan pendidikan tanpa terkendala ekonomi.

Dalam pelaksanaan program, pemerintah desa berperan aktif sebagai penghubung antara masyarakat dengan dinas pendidikan dan pihak sekolah. Pendataan calon penerima manfaat dilakukan secara kolaboratif bersama pendamping sosial dan aparat desa untuk memastikan bahwa penerima KIP benar-benar berasal dari keluarga tidak mampu. Selain itu, kegiatan sosialisasi program KIP juga dilaksanakan secara berkala di aula desa maupun sekolah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai tujuan, kriteria, dan cara penggunaan bantuan pendidikan tersebut.

Namun, penelitian juga menemukan beberapa kendala utama, antara lain:

1. Keterlambatan pencairan dana yang menyebabkan siswa tidak dapat segera menggunakan bantuan pada waktu yang dibutuhkan.
2. Data penerima manfaat yang belum akurat, di mana masih ditemukan siswa dari keluarga mampu yang menerima bantuan, sementara siswa dari keluarga miskin belum semuanya terdata.
3. Kurangnya pengawasan penggunaan dana, karena penyaluran dana langsung melalui rekening siswa menyebabkan sekolah sulit memantau penggunaannya.
4. Minimnya sosialisasi lanjutan dari pihak dinas pendidikan yang membuat sebagian orang tua kurang memahami prosedur pencairan dan pelaporan penggunaan dana.

Meskipun demikian, secara umum dampak program KIP di Desa Tolowata sangat positif, baik dari sisi sosial maupun pendidikan. Siswa penerima bantuan menjadi lebih termotivasi untuk melanjutkan sekolah, tingkat kehadiran meningkat, dan risiko putus sekolah menurun. Program ini juga menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan sebagai hak dasar yang harus dipenuhi oleh negara.

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, pelaksanaan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Desa Tolowata dapat dikategorikan cukup efektif dalam membantu mewujudkan

hak pendidikan bagi siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu. Hal ini sesuai dengan teori implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Merilee S. Grindle (dalam Nugroho, 2021), bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, serta struktur birokrasi.

Dalam konteks pelaksanaan KIP di Desa Tolowata, keberhasilan program banyak dipengaruhi oleh adanya koordinasi yang baik antara pemerintah desa, sekolah, dan pendamping sosial PKH. Pihak sekolah turut berperan penting dalam mendata siswa calon penerima bantuan serta memantau perkembangan akademik mereka setelah menerima bantuan. Selain itu, pemerintah desa juga menjadi fasilitator utama dalam menyampaikan informasi program kepada masyarakat.

Secara substansial, pelaksanaan KIP di desa ini telah memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan akses pendidikan. Program ini berhasil menekan angka putus sekolah, terutama di tingkat SMP, serta meningkatkan semangat belajar siswa karena mereka tidak lagi terlalu terbebani biaya sekolah. Dengan demikian, KIP tidak hanya berperan sebagai kebijakan sosial ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen untuk menegakkan hak konstitusional warga negara dalam memperoleh pendidikan yang layak sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 Pasal 31.

Namun, temuan di lapangan juga menunjukkan bahwa efektivitas program masih terhambat oleh kendala administratif dan teknis. Beberapa faktor penghambat di antaranya adalah:

1. Data penerima manfaat yang belum sinkron antara pemerintah pusat, dinas pendidikan, dan data desa.
2. Kurangnya pengawasan dari pihak sekolah terhadap penggunaan dana bantuan.
3. Minimnya evaluasi rutin dari dinas pendidikan terhadap pelaksanaan program di tingkat desa.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun kebijakan KIP secara konsep sudah baik, namun implementasinya masih memerlukan perbaikan pada aspek pelaksanaan dan monitoring. Evaluasi berkala dan sistem pendataan berbasis digital yang lebih akurat

perlu diterapkan agar sasaran program benar-benar tepat. Selain itu, peningkatan sosialisasi dan pelatihan bagi aparat desa serta masyarakat penerima manfaat sangat penting untuk meminimalkan kesalahan dalam penggunaan dana bantuan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Program Kartu Indonesia Pintar di Desa Tolowata telah berperan signifikan dalam mewujudkan hak pendidikan bagi siswa dari keluarga tidak mampu, namun masih memerlukan peningkatan dalam aspek administrasi, koordinasi, dan pengawasan agar pelaksanaannya lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Desa Tolowata, Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima telah berjalan cukup efektif dalam membantu siswa dari keluarga kurang mampu memperoleh hak pendidikan. Program ini berkontribusi nyata dalam meringankan beban ekonomi orang tua, meningkatkan partisipasi sekolah, serta menurunkan angka putus sekolah.

1. Keberhasilan pelaksanaan program didukung oleh kerja sama antara pemerintah desa, pihak sekolah, dan pendamping sosial dalam proses pendataan, verifikasi, serta sosialisasi. Namun, efektivitas program masih terkendala oleh beberapa faktor seperti keterlambatan pencairan dana, ketidaktepatan data penerima, dan kurangnya pengawasan penggunaan bantuan.
2. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sistem pendataan dan koordinasi antarinstansi, serta penguatan sosialisasi dan evaluasi berkala agar pelaksanaan KIP semakin tepat sasaran dan berkelanjutan dalam mewujudkan pemerataan hak pendidikan bagi seluruh anak di Desa Tolowata dan wilayah lainnya.

B. Saran

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, disarankan agar pihak sekolah, pemerintah desa, dan instansi terkait meningkatkan koordinasi dan integrasi sistem pendataan penerima Program Kartu Indonesia Pintar (KIP). Pendataan harus dilakukan secara berkala dan menyeluruh agar siswa yang

benar-benar layak menerima bantuan dapat terakomodasi secara tepat sasaran.

DAFTAR RUJUKAN

- Asfar, (2021). *Implementasi kebijakan program kartuindonesia pintar (KIP) di SMP Negeri 1 Labakkang Kabupaten Pangkep*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Astuti, R.S. (2020). *Efektivitas Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa di SMP Negeri 3 Sewon Bantul*. Skripsi, Universitas PGRI Yogyakarta.
- Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos (2012), "*Hasil Kaji Cepat Kondisi Sosial RTSM PKH tahun 2007 (2012)*", Jakarta.
- Dwiyanto, Agus. (2021). *Manajemen Pelayanan Publik: Pedoman Praktis Peningkatan Kinerja Lembaga Pelayanan Publik*. Gadjah Mada University Press.
- Faisal, (2020). *Kartu Indonesia Pintar (KIP) Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Pendidikan*. *Jurnal Ilmiah Iqra*, 8(1), 49–60.
- Grindle, Merilee S. (2017). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Princeton University Press.
- Hamidi, (2021). *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Dalam Penelitian Akademik*. CV. LiterasiNusantara Abadi.
- Hasibuan, M. (2022). *Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi dalam Kebijakan Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hasnah, S.A. (2020). Pendidikan Inklusif Sebagai Strategi Mewujudkan Pendidikan Yang Berkualitas. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 6(2), 216–221.
- Herlinawati, (2020). *Efektivitas Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa di SMP Negeri 3 Sewon Bantul*. Skripsi, Universitas PGRI Yogyakarta.
- Hessel Nogi S. (2020). *Kebijakan Publik Teori, Aplikasi dan Proses*. Pustaka Pelajar.
- Jalal, F. (2021). *Kartu Indonesia Pintar (KIP) Solusi Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Usia Sekolah*. *Jurnal Penelitian Pendidikan dan Pengajaran*, 1(1), 51–64.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2020). *Permendikbud Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar*. Jakarta: Kemendikbud.
- Muhammadi, (2023). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Dalam Penelitian Akademik*. CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Mustari, M., & Rahman, M.T. (2012). *Pengantar metode penelitian*. Laksbang Pressindo.
- Nainggolan, T, dkk (2012), "*Program Keluarga Harapan diIndonesia: Dampak pada Rumah Tangga Sangat Miskin di Tujuh Propinsi*", P3KS Press
- Nashrullah, M., Maharani, O., Rohman, A., Fahyuni, E. F., & Untari, R. S.(2023). *Metodologi Penelitian Pendidikan (Prosedur Penelitian, Subyek Penelitian, Dan Pengembangan Teknik Pengumpulan Data)*. Umsida Press,1–64.
- Nugroho R.(2020). *Public Policy Teori Kebijakan Publik*. Elex Media Komputindo.
- Nugroho, R. (2021). *Kebijakan Publik Teori, Aplikasidan Proses*. Pustaka Pelajar.
- Nugroho, Riant.(2014). *PublicPolicy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*.
- Nurlaili, S. (2023). "*Kesenjangan Informasi dalam Implementasi Program Sosial di Wilayah Pedesaan*." *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 12(1), 45–58.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PeraturanPresiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Program Indonesia Pintar.
- Pradana, I., Prasaningtyas, A., & Ariyaningsih, A. (2023). *Analisis DPSIR Untuk Mengetahui Dampak Lingkungan Yang Ditimbulkan Dari Pengembangan*
- Pratiwi, R. D., & Suwitri, S. (2018). *Efektivitas Program Indonesia Pintar dalam*

- Meningkatkan Partisipasi Sekolah Siswa dari Keluarga Kurang Mampu. *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, dan Pengembangan*, 3(11), 1457-1463.
- Presiden Republik Indonesia. (2014). *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Program Indonesia Pintar*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Profil Desa Tolowata. (2023). Data Pemerintahan dan Kependudukan Desa Tolowata. Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima.
- Rahmatullah, A. (2023). *Implementasi Program Bantuan Sosial Pendidikan dan Tantangannya di Daerah Tertinggal*. Surabaya: Laksana Media.
- Rambe, E.F. (2023). *Teori Implementasi Kebijakan*. Widina Bhakti Persada Bandung.
- Samsu, (2021). *Implementasi kebijakan program kartu indonesia pintar (KIP) di SMP Negeri 1 Labakkang Kabupaten Pangkep*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Sardiman, (2021). *Strategi Implementasi Kebijakan Pendidikan*. UNY Press.
- Saroni, M. (2013). *Kebijakan Publik*. Mitra WacanaMedia.
- Subarsono, A. G. (2012). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: PustakaPelajar.
- Sugyono, (2020). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. In *Metodologi Penelitian Kualitatif*. <https://scholar.google.com/citations?user=OB3JYAAAAJ&hl=en>
- Suhardi, (2021). *Manajemen Pendidikan*. CV. IRDH.
- Sujatmoko, (2020). *Hukum dan Kebijakan Publik*. SCOOP Media.
- Supeno, H. (2010). *Kriminalisasi Kemiskinan di Indonesia*. Resist Book.
- Syaukani, dkk (2021). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. UMM Press.
- Tahir, (2021). *Kebijakan Publik Dan Manajemen Konflik*. CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Tilaar, (2019). *Kebijakan Pendidikan: Pengantar Kepada Kebijakan Pendidikan Untuk Mengembangkan Kreativitas, Inovasi, Dan Karakter*. Pustaka Pelajar.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Wahab, (2019). *Kebijakan Publik*. CV. Adanu Abimata.
- Wahyudi, Agus. (2016). Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis dalam Meningkatkan Aksesibilitas Pendidikan Dasar di Kabupaten Jember. *Jurnal Kebijakan dan Pelayanan Publik*, 2(1), 1-15.
- Warsita, P (2023). *Implementasi Kebijakan Publik*. Alfabeta, CV.
- Winarmo, (2021). *Manajemen Kebijakan Publik: Konsep Dan Aplikasi*. Bumi Aksara.
- Yani, Lilis. (2020). "Analisis Efektivitas Program Indonesia Pintar di Sekolah Menengah Pertama." *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Kebijakan*, 7(2), 134-142